

Etnis Jawa dalam Memori Kolektif Konflik GAM dan Upaya Peacekeeping di Aceh

Joelismansyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

humas@uin-suka.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received: 31-08-2022

Accepted: 30-09-2022

Keywords:

Collective Memory,

GAM Conflict,

MoU Helsinki.

Abstract: The aim of this study is to examine the function of collective memory in relation to the Free Aceh Movement (GAM) conflict and its implications for peacekeeping efforts in Aceh, specifically in the post-conflict period following the mediation process in 2005. Employing a qualitative research methodology, the primary data for this study is derived from in-depth interviews conducted with individuals who possess personal conflict memories. The theoretical frameworks of Maurice Halbwachs and Aleida Assmann are employed to analyze and interpret the concept of collective memory. The research findings shed light on the significant role of collective memory in maintaining and reinforcing the Memorandum of Understanding (MoU) that was established between GAM and the Central Government. The Acehnese society, as a whole, demonstrates support for this notion, as they have been able to interpret the conflict as a reflection of their historical experiences and utilize these memories to inform present-day conflict dynamics. The collective memory of the GAM conflict serves as a valuable resource for learning and education, providing insights and lessons for future generations in Aceh. By understanding and engaging with their collective memory, the Acehnese people can navigate the complexities of their history and contribute to sustainable peacebuilding efforts in the region.

Kata Kunci

Konflik GAM,

Memori Kolektif,

MoU Helsinki.

Abstrak: Memori kolektif merupakan sekumpulan ingatan yang diajukan dan disahkan oleh keadaan sosial tertentu, misalnya dalam kasus konflik Aceh, ingatan konflik tentang peristiwa atau kejadian selama konflik yang terjadi di masa lalu dibenarkan pada masa sekarang oleh sosial masyarakat yang mengetahui dan mengalami konflik secara langsung dan meneruskan pada generasi berikutnya melalui sebuah media. Media tersebut dapat berupa gambar, bangunan dan cerita dari mulut ke mulut, penelitian ini bertujuan mengurai fungsi dari memori kolektif konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam upaya Peacekeeping di Aceh yang telah terajut pada tahun 2005 silam melalui Mediasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang sumber datanya diperoleh dari hasil wawancara informan yang merasakan dan memiliki ingatan konflik, kemudian untuk menjelaskan tentang memori kolektif, menggunakan teori Maurice Halbwach dan Aleida Assman. Dari hasil penelitian memori kolektif konflik GAM pada masyarakat Aceh berperan dalam menjaga MoU yang telah dirajut antara GAM dan Pemerintah Pusat, hal tersebut didukung oleh masyarakat Aceh secara umum yang telah mampu memaknai konflik sebagai refleksi dari masa lalu dan mengimplementasikannya sesuai dengan konteks masa kini yang menganggap ingatan konflik sebagai bahan pembelajaran untuk generasi Aceh yang akan datang.



© 2022 Al Mabḥats : Jurnal Penelitian Sosial Agama

Under The License [CC-BY SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

CONTACT: humas@uin-suka.ac.id

<https://doi.org/10.47766/almabḥats.v7i2.630>

PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian dari perjalanan sejarah Aceh, sejak masa kedatangan portugis dengan misi perdagangan hingga masa penjajahan jepang, masyarakat Aceh sangat familiar dengan perlawanan dan berujung dengan peperangan. Kegemaran dan keahlian masyarakat Aceh dalam berperang telah diakui oleh negara-negara seperti portugis, belanda, cina dan kerajaan-kerajaan yang berdaulat pada masa tersebut, berkat kepiawaian tersebut, Puncak kejayaan kerajaan Aceh terjadi pada masa Sultan Iskan Muda, pada masa tersebut kerajaan Aceh berhasil mengepaskan sayap kekuasaanya dengan menguasai selat malaka.

Kejayaan Aceh juga mengalami masa kemunduran setelah mangkatnya sultan iskandar Tsani pengganti sultan iskandar muda dan semakin menguatnya pengaruh belanda yang didukung oleh beberapa Uleebalang (tokoh) dalam upaya memperlonggar kontrol sultan hingga pecahnya perang terhadap belanda pada tahun 1873, namun belanda tidak pernah menguasai Aceh sepenuhnya sampai tahun-tahun kedatangan jepang, hal tersebut disebabkan oleh respon masyarakat yang tidak mudah rapuh dan tunduk terhadap penjajahan dan menganggap belanda musuh yang telah merusak ketentraman di bumi Aceh dan harus dilawan.

Sejarah keheroikan masyarakat Aceh dalam bertempur membela tanah air hingga saat ini masih dijadikan sebagai identitas sosial, bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat pejuang yang rela mati demi mempertahankan marwah dan harga diri sehingga belanda mengibaratkan Aceh moorden atau Aceh gila, gila dalam artian melakukan suatu hal di luar batas kewajaran termasuk dalam hal berperang melawan penjajahan dan ketidakadilan. Melangkah jauh pada pasca kemerdekaan Indonesia dan kebesaran hati rakyat Aceh bergabung dengan Indonesia ketidakadilan terus dialami oleh masyarakat Aceh, seperti peleburan Aceh dalam sumatera utara, pembagian sumber daya alam yang tidak merata dan lain sebagainya secara langsung merangsang terjadinya konflik yang berujung pada perang saudara. Munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan hasil dari rangsangan tersebut.

Gerakan tersebut digagasi oleh Hasan Tiro, pergerakan GAM semakin memuncak setelah pemerintahan Orde Baru yang mengeksplorasi gas alam dan minyak bumi di Aceh Utara sejak awal 1970-an. Hasan Tiro memunculkan dirinya sebagai "Duta Besar Republik Indonesia Islam Aceh". Sejak saat itu, ia ikut berdiplomasi di luar negeri, terutama di New York untuk memasukan agenda-agenda tentang Aceh dalam forum internasional PBB. Salah satu puncaknya adalah ketika ia mencetuskan GAM pada tahun 1976 (Sawitri, dkk, 1998:15).

Dalam perkembangannya kemudian GAM telah melalui tiga fase penting, yaitu fase pertama, 1976-1989, GAM merupakan organisasi kecil yang anggotanya di dominasi dari kaum terpelajar dan GAM menjadi gerakan bawah tanah (Ishak, 2008:64). Fase kedua, 1989-1998, fase ini lebih di kenal oleh rakyat Aceh sebagai era Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) Operasi ini kemudian memuluskan jalan bagi operasi bersenjata di Aceh(Ishak, 2008:16). Fase ketiga, pasca 1998, dalam fase ini, pemerintah pusat masih tetap menggunakan kekerasan (Ishak, 2008:16).

Tepat pada tanggal 15 Agustus 2005, konflik antara gerakan masyarakat dengan pemerintah Indonesia ini berakhir dengan ditanda tangani sebuah perjanjian damai antara kedua belah pihak yang dikenal dengan Nota kesepahaman atau lebih familiar di kalangan rakyat Aceh dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki. Ini merupakan sebuah konsensus politik yang berakibat hukum dengan diundangkannya Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Proses panjang dan berliku yang berdimensi hukum, militer, dan hak asasi manusia (HAM) menjadikan MoU Helsinki yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 15 Agustus 2005 silam, tidak hanya menjadi momentum sosial politik penting bagi Aceh dan Indonesia, juga menjadi perjalanan hukum baru bagi masyarakat Aceh dengan ditetapkannya kewenangan dalam bentuk Otonomi Khusus (OTSUS). Perjalanan rumit nan berarti ini sudah semestinya dijaga dengan kesadaran kolektif salah satunya dengan terus merawat ingatan kolektif konflik untuk dijadikan reflektor dalam setiap tindakan agar perang saudara beberapa tahun silam tidak terulang kembali, dan dijadikan pembelajaran bersama untuk masa depan Aceh yang aman dan tenram.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif, data dari metode ini di dapatkan dari hasil wawancara langsung dengan informan yang memiliki memori konflik Gerakan Aceh Merdeka. Dalam penulisan profil informan, dalam tulisan ini tidak mencantumkan nama asli akan tetapi menggunakan inisial sesuai dengan permintaan informan sendiri pada saat proses wawancara berlangsung. Adapun teori yang digunakan untuk memperkuat narasi dalam tulisan ini adalah teori memori kolektif Maurice Halbwach dan diperkuat oleh pendapat Aleida Assman yang akan mengurai memori kolektif dan fungsinya dalam upaya merawat perdamaian yang sudah terjalin di Aceh sejak tahun 2005 dengan pemerintah Pusat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosiografis Daerah Aceh

Agama

Mayoritas masyarakat Aceh memeluk Agama Islam, jumlah penduduk Muslim di daerah Aceh merupakan posisi tertinggi di Indonesia dan hidup sesuai dengan syariah Islam. Islam masuk ke Aceh sejak masa kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu kerajaan Peureulak pada abad ke 8, kemudian pada abad ke 13 dilanjutkan oleh kerajaan Islam Pase dan kemudian disusul oleh kerajaan Islam Aceh Darussalam pada akhir abad ke 15. Dari keseluruhan sistem kerajaan di atas menempatkan agama Islam sebagai agama utama yang menjadi pedoman atau landasan dalam sosial, budaya dan perpolitikan dalam sistem kerajaan dan masyarakat.

Proses tersebut menjadikan Aceh sebagai wilayah Islam yang kemudian dikenal dengan “Seuramoe Meukah”, dalam bahasa Indonesia memiliki arti Serambi Mekah karena corak ke-Islaman sangat kental dalam sosial masyarakat hingga bertranformasi menjadi identitas sosial di Aceh (Nazaruddin: 2014:46). Dengan jumlah pemeluk agama islam terbanyak, tidak menutup kemungkinan bagi agama-agama lain berkembang di Aceh, karena masyarakatnya sendiri sejak dulu sudah terbiasa dengan nilai toleransi begitu juga terhadap etnik, warna, ras, dan lain sebagainya.

Ekonomi

Pencarian masyarakat Aceh sejak zaman dahulu secara umum adalah bertani, berdagang, nelayan dan tukang seperti besi, kayu, bangunan. Pada sektor pertanian yang paling utama adalah padi dan lada. Padi yang diolah menjadi beras merupakan makann pokok masyarakat Aceh sejak zaman dahulu dan lada menjadi komoditas primadona pada sektor ekspor dan dalam negeri. Tidak heran jika hasil alam ini yang menjadi salah satu penyebab masuknya penjajah ke Aceh.

Tidak hanya bertani, masyarakat Aceh juga ahli dalam ilmu pertukangan, seperti tukang meriam, tukang kapal, tukang besi, tukang tenun, dan lain sebagainya. Kelihaihan masyarakat pada bidang bahari juga tidak kalah penting, profesi nelayan juga sangat mendominasi mata pencarian masyarakat pada masa itu hingga sampai saat ini(Azwad, 2008:61). Beberapa profesi diatas berkontribusi banyak dalam perputaran roda perekonomian di Aceh hingga saat ini.

Politik

Sistem perpolitikan Aceh jika dilihat dari sebelum kedatangan belanda memiliki tatanan kepemimpinan dengan sistem kesultanan atau yang lebih dikenal dengan sistem pemerintahan-kerajaan monarchi. Sultan merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan sekaligus pemimpin masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan, namun dalam praktiknya Sultan dibantu oleh pemangku adat (uleebalang) yang diberi gelar Teuku dan pemangku agama atau ulama yang bergelar Teungku.

Uleebalang bertugas menjadi pembantu Sultan di daerah-daerah kekuasaan dibawah kontrol Sultan. Uleebalang pada awalnya diangkat oleh Sultan berdasarkan surat pengangkatan dari Sultan sendiri. Pengangkatan ini membutuhkan biaya untuk kepentingan pembuatan surat pengangkatan. Berbeda dengan Teungku yang merupakan salah satu pilar dan elemen elit dalam sosial masyarakat Aceh. Teungku merupakan tokoh keagamaan yang dihormati karena keahliannya di bidang agama yang menjadi poin penting dalam keberlangsungan sosial dan budaya masyarakat. Gelar teungku yang mereka peroleh bukan atas dasar pengangkatan oleh Sultan dan juga bukan melalui proses pewarisan, gelar tersebut diperoleh oleh seleksi sosial masyarakat atas ilmu dan prestasi keagamaan yang mereka miliki(Muchsin, 2007:69). Selain dari dua elemen sosial diatas, keturunan Sultan juga memiliki andil dalam roda pemerintahan yang memiliki sebutan Tuanku yang berasal dari anggota keluarga laki-laki kesultanan yang dalam strata sosial masyarakat Aceh berada di atas lapisan keturunan uleebalang. Tiga elit sosial inilah yang menjadi mitra kerja Sultan dalam mengembangkan tugas untuk mengurus masyarakat sekaligus pemerintahan secara keseluruhan. Pasca MoU pada tahun 2005 yang melahirkan butir-butir perjanjian, secara resmi sistem perpolitikan Aceh selaras dengan sistem yang diterapkan oleh Negara Indonesia pada daerah-daerah Indonesia lainnya.

Budaya

Perkembangan budaya masyarakat Aceh sarat dengan unsur-unsur keislaman. Budaya berlandaskan keislaman termasuk bagian integral dalam budaya masyarakat Aceh. Peranan agama Islam sangat berpengaruh pada kebudayaan masyarakat Aceh. Ada tiga cara terkontruksinya Islam dalam kebudayaan masyarakat Aceh, yang pertama, mengislamkan kebudayaan yang telah ada. Kedua, menghapus segala kebudayaan yang bertentangan dengan aqidah dan ibadah. Ketiga, membangun kebudayaan yang baru sepenuhnya. Kebudayaan yang berlandaskan keislaman di Aceh dapat kita temukan pada

bukti-bukti sejarah yang menguak tentang sistem pemerintaan kerajaan Aceh pada masa silam. Pengaruh Islam dalam kebudayaan Aceh berefek kepada perilaku kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam segi mentalitas perilaku dan juga pada tatanan pergaulan.

Budaya bagi masyarakat Aceh lebih populer dengan sebutan adat. Sebutan adat menjadi penting karena bersumber dari nilai-nilai Islami yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Kata adat berasal dari bahasa Arab "a'dadun" yang jika diartikan memiliki makna berbilang, mengulang berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Pengulangan prilaku yang dilakukan terus menerus dalam kehidupan sehari-hari menjadikannya sebuah kebiasaan yang disebut dengan Adat(Badruzzaman, 2018:8). Kebiasaan atau adat ini dapat disaksikan sampai dengan sekarang seperti pada perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada sepanjang bulan Rabi'ul Awal hingga pada bulan Jumadil Akhir, adat penyambutan malam nuzulul Qur'an pada bulan ramadhan, dan juga adat yang bersifat seremonial seperti upacara perkawinan, khanduri blang, khanduri laot, upacra khitan sunnah rasul, hakikah, khatam Qur'an dan lain sebagainya.

Adat Aceh bersumber pada empat rumusan klasifikasi adat, yang pertama, Adatullah yang berarti hukum adat yang bersumber pada hukum Allah yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Kedua, Adat Tunnah yaitu adat istiadat yang sebagai manifestasi kanun dan reussam yang mengatur kehidupan masyarakat. Ketiga, Adat Muhakamah, yaitu huku adat yang dimanifestasikan pada atas musyawarah dan mufakat. Keempat, Adat Jahiliyah, yaitu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam namun masih banyak dilakukan oleh masyarakat(Badruzzaman, 2018:9). Perilaku kehidupan masyarakat Aceh yang demikian menunjukkan bahwa tatanan kehidupan budaya adatnya didominasi oleh pengaruh Agama Islam yang mencakup hampir dari seluruh sisi kehidupan masyarakat. Namun demikian, kehidupan antar umat beragama di Aceh sangat toleran meskipun secara umum tidak ada orang Aceh yang tidak beragama Islam.

Memori kolektif Maurice

Maurice Halbwachs selain seorang sosiolog Beliau juga banyak menyumbang pemikirannya terhadap filsafat. Ide-ide dalam gagasannya dipengaruhi oleh pemikiran Emile Durkheim yang ditafsirkan olehnya secara kreatif termasuk teori tentang memori kolektif yang sedikit banyaknya nya dipengaruhi oleh ide dasar Emile Durkheim.

Selain Durkheim pemikirannya juga dipengaruhi oleh beberapa pemikir lain seperti Joseph Schumpeter, Max Weber dan Pareto. Pemikiran Halbwachs ikut

berkontribusi besar dalam perkembangan pemikiran Prancis kontemporer. Seorang sosiolog sekaligus filsuf kelahiran Prancis pada tahun 1877 ini, Halbwachs memiliki latar belakang keluarga Katolik akan tetapi secara umum keluarganya sangat memegang erat nilai-nilai liberal dan menjadi salah satu pendukung utama cita-cita demokrasi dan revolusi Perancis dan menjadikan Halbwachs anggota dari Partai Sosialis di Negara tersebut. Pada bidang filsafat pemikirannya dipengaruhi oleh pemikiran Henri Bergson dan pemikiran Emile Durkheim pada bagian sosiologi. Namun untuk memahami hakikat dari sosialitas manusia Halbwachs banyak terinspirasi dari pemikiran Durkheim, akan tetapi tidak mengenyampingkan pemikiran filsafat Bergson tentang filosofis individualistik yang nantinya di kolaborasikan sebagai dasar teori tentang memori kolektif atau ingatan kolektif (Halbwachs, 1997: 34).

Oleh dasar pemikirannya tersebut dapat dipahami bahwasannya ingatan kolektif erat kaitannya antara Ingatan masa lalu dengan keadaan di masa sekarang. Dalam artian lain memori kolektif merupakan rekonstruksi sosial atas masa lalu dari sudut pandang masa kini. Menurut Maurice ingatan selalu memiliki dasar yang bersifat kolektif. Ingatan selalu menjadi sebuah produk dari sosialitas manusia yang berkembang dan dirawat melalui hubungan atau relasi manusia dalam sebuah sosial masyarakat, dalam artian lain, ingatan manusia merupakan bagian dari ingatan kolektif. Terdapat hubungan erat antara ingatan personal dan ingatan kolektif yang artinya antara ingatan individu manusia selalu dipengaruhi oleh Ingatan kolektif masyarakat, pendapat ini sekaligus dijadikan oleh Halbwachs sebagai bantahan terhadap argumen yang mengasumsikan pikiran dan imajinasi manusia hanya dipahami sebagai hal pribadi semata. Identitas pribadi manusia erat kaitannya dengan ingatan kolektif masyarakat, identitas pribadi tersebut selalu tertanam di dalam konteks sosial.

Kontruksi Memori Kolektif Konflik Masyarakat

Memori kolektif dapat tercipta dengan beragam faktor, salahsatunya disebabkan oleh ketersediaan media yang berkontribusi sebagai tempat berkembang sekaligus merawat ingatan masyarakat tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu yang kemudian menjadi pengetahuan untuk masa kini. Media tersebut dapat berupa bangunan atau arsitektur peninggalan atau monumen yang sengaja dibangun dengan tujuan refleksi dan pembelajaran untuk generasi-generasi selanjutnya.

Perawatan tersebut dalam konteks konflik GAM sangat perlu, mengingat konflik tersebut merupakan bagian dari perjalanan masyarakat Aceh hingga detik ini dan harus tetap dijaga sebagai bentuk pembelajaran konflik, hal ini berkaitan dengan pendapat Aleida Assman tentang ingatan, Ingatan menurut

Aleida membutuhkan media untuk menjaga dan menyimpan berupa ruang-ruang yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh masyarakat agar dapat memahami masa lalunya. Terdapat empat tujuan atau fungsi dari keberadaan ruang-ruang untuk ingatan. Pertama, sebagai penciptaan kenyataan pada masa sekarang. Kedua, sebagai pembentuk identitas kolektif. Ketiga, sebagai petunjuk untuk keberlangsungan hidup bersama dan yang Keempat berfungsi sebagai alasan dalam tindakan bersama(Halbwach, 1997:22). Kemudian menurut Assman didalam ingatan kolektif tedapat aspek refleksifitas yang keberadaannya memungkinkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat dan untuk penegembangan perpektif masa lalu untuk penerapannya di masa sekarang.

Konflik GAM di Aceh masih terbenak dalam ingatan masyarakat, namun saat ini tidak semua masyarakat Aceh merasakan konflik secara langsung akan tetapi ingatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi saat konflik berlangsung dapat diketahui melalui media-media yang disebutkan diatas. Keberadaan bangunan-bangunan, foto atau gambar, cerita dari mulut kemulut hingga detik ini masih sangat mudah ditemui, kegiatan mentransfer ingatan inilah yang menjadikan cerita, gambar dan media lainnya menjadi sebuah memori bersama atau ingatan kolektif yang tanpa sadar terkontruksi dan berdampak pada masa depan Aceh di masa yang akan datang.

Memori kolektif erat kaitannya dengan sejarah, begitu juga dengan ingatan konflik masyarakat Aceh, sejarah sering dijadikan argumen untuk menciptakan semangat perlawanan begitu juga sebaliknya, sejarah telah berperan penting dalam proses mediasi antara GAM dan Pemerintah pusat, namun hanya segelintir orang yang menyadari peranan sejarah tersebut, dalam kasus konflik GAM yang menyadari sekaligus memahami sejarah dan memori kolektif masyarakat Aceh salah satunya Jusuf Kalla, yang pada saat itu merupakan wakil presiden republik Indonesia terpilih yang menjadi aktor penting dalam perumusan perdamaian diantara kedua belah pihak yang bertikai ini. Berkat pemahaman beliau tentang sejarah dan ingatan kolektif masyarakat Aceh beliau berhasil menarik simpati para elite Aceh guna menghindari kegagalan seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Jusuf kalla lebih mengedepankan dialog dengan memahami latar belakang budaya dibandingkan dengan proses yang bersifat militeristik.

Tercatat selama pemerintahan Soeharto, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan melalui pendekatan keamanan dan sangat menutup untuk upaya berdialog, apalagi untuk mendatangkan mediator. Pendekatan menggunakan elemen kemiliteran digunakan pada masa rezim tersebut yang berasalan bahwa GAM dianggap kelompok pengacau atau mengganggu proses pembangunan, dan

gagasan tersebut sangat di dukung oleh TNI/Polri untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politiknya di Aceh. Setelah lahirnya era reformasi, pendekatan melalui dialog dimulai, akan tetapi kondisi dan keadaan Aceh pada saat itu masih didominasi oleh militer.

Ketiga Presiden yang menjabat setelah Soeharto tersebut merasa bahwa pendekatan dengan cara berdialog atau berinteraksi sangat penting untuk menemukan solusi konflik politik di Aceh dengan cara yang lebih manusiawi, akan tetapi upaya tersebut pun masih di anggap gagal. Penyebab kegagalan tersebut karena mereka tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengontrol kuatnya peran politik TNI/Polri dalam kepentingannya di Aceh dan enggan untuk melepaskannya. Ini merupakan sifat ambiguitas aparat pada masa itu yang merupakan salah satu penyebab sulitnya pendekatan dialog dilaksanakan untuk menyudahi konflik politik di Aceh dan kecanduan mereka terhadap kepentingan politik dan ekonomi yang sudah lama dimainkan sejak pemerintahan Soeharto.

Pada proses perundingan, atas kelihian Jusuf Kalla dalam memahami karakteristik sejarah dan memori kolektif masyarakat Aceh tidak terkecuali para elit dan tokoh-tokoh GAM tidak satupun juru runding perwakilan Indonesia berlatar belakang etnis Jawa. Hal ini dikarenakan, etnis Jawa dianggap memiliki peran dan citra buruk dalam konflik dan memori kolektif masyarakat Aceh. anggapan tersebut bukan tanpa alasan, pada saat awal kebangkitan gam, etnis Jawa merupakan etnis yang dianggap kesinambungan dari kolonial Belanda, etnis Jawa mendominasi dalam setiap kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan-kebijakan yang telah melukai hati rakyat Aceh dan berdampak pada munculnya sentimen etnis.

Sentimen terhadap suatu etnis merupakan salah satu rangkaian yang mewarnai konflik GAM di Aceh yang deklarasikan oleh Hasan Tiro dan berhasil mendapatkan simpati dari berbagai elemen masyarakat Aceh bahkan mendapatkan dukungan dari luar negeri. Keberhasilan Tiro dalam memobilisasi dan merawat perlawanan terhadap pemerintah pusat dengan menciptakan logika perbedaan dan persamaan merupakan strategi yang menjadikan GAM semakin eksis dan bertahan hingga tahun 2005. Adapun strategi yang digunakan Tiro dengan memanfaatkan pengalaman dan ingatan romantisme sejarah bangsa Aceh. sebelum bergabung dengan Indonesia Aceh merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan memiliki masyarakat yang berjiwa patriot, pantang menyerah. Doktrin-doktrin tersebut terus dikembangkan untuk menciptakan logika perbedaan terhadap pemerintah pusat yang kala itu dianggap kesinambungan dari penjajahan Belanda atau neo-kolonial Belanda. Seperti kalimat-kalimat yang terdapat teks deklarasi Aceh-Sumatra Merdeka.

Anggapan-anggapan tersebut muncul dan terkontruksi disebabkan oleh sikap pemerintah pasca kemerdekaan terhadap rakyat Aceh yang acap kali mengingkari perjanjian-perjanjian seperti menjadikan Aceh daerah yang berlandaskan syariah islam, yang kemudian oleh Soekarno ingkar terhadap janji yang telah disepakatinya dengan para ulama dan rakyat Aceh kala itu. Kekecewaan rakyat terhadap pemerintah pusat semakin meningkat dengan penggabungan daerah Aceh yang dileburkan ke dalam sumatera utara dan secara otomatis menghilangkan jati diri Aceh yang pernah berkontribusi untuk kemerdekaan republik Indonesia.

Momen-momen kekecewaan tersebut kemudian bertransformasi menjadi sebuah luapan yang berimbang terhadap suatu etnis, adapun Etnis yang menjadi kambing hitam atas sikap pemerintah pusat adalah etnis Jawa, karena etnis Jawa dianggap etnis yang mendominasi pemerintah pusat dan termasuk aktor dalam setiap kebijakan-kebijakan pusat. Tercatat pasca bergabungnya Aceh dengan Indonesia, eksploitasi hasil alam seperti minyak dan gas tidak berpengaruh besar pada kemajuan daerah Aceh. ini berbanding terbalik dengan daerah-daerah dipulau Jawa yang terus berkembang pasca kemerdekaan padahal daerah tersebut hanya memiliki sumber daya alam yang lebih sedikit dibandingkan Aceh, hal ini semakin menambah kekecewaan Aceh terhadap pusat.

Kekecewaan tersebut berimbang kepada Etnis Jawa yang dianggap bagian dari kebijakan Pusat yang kemudian terkontruksi menjadi musuh baru atau the new invader, Indonesia-Jawa. Kemudian pemahaman tersebut digunakan oleh gerakan ini untuk melawan penjajahan Jawa yang telah menduduki wilayah tanah air dan kekayaan alam Aceh (Kell, 1995: 64). Tercatat pada tahun-tahun darurat militer banyak dari masyarakat etnis Jawa di Aceh mendapatkan diskriminasi, sekurang-kurangnya menjadi sasaran prasangka masyarakat yang mencurigai mereka sebagai mata-mata aparat dan Pemerintah Pusat.

Refleksi konflik dan Peacemaking

Tahun 2005 merupakan tahun bersejarah bagi masyarakat Aceh untuk semua kalangan dan lapisan masyarakat, pada tahun tersebut ditanda tangani nota kesepahaman antara pihak berseteru yang sudah sangat lama diimpikan oleh masyarakat Aceh. masyarakat Aceh pasca konflik sudah lebih leluasa menjalankan kegiatan sosialnya, seperti bekerja, bersilahturai dari kota ke kota, bebas berekspresi dan berpendapat yang semua kegiatan tersebut ketika konflik sangat minim kesempatan untuk melakukannya, karena daerah Aceh beberapa kali menjadi daerah operasi militer, oleh karena itu segala gerak-gerik masyarakat tidak luput dari pantauan aparat, begitu juga dari pantauan GAM sendiri dan rasa serba salah selalu menghantui masyarakat dalam bertindak.

Keadaan Aceh kini sangat jauh lebih baik dibandingkan ketika konflik, masyarakat sudah hidup dengan aman dan tenang di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa harus dihantui oleh rentetan peluru dari saudara sendiri. Keadaan ini sangat menguntungkan Aceh dari berbagai sektor, seperti pada sektor ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, tentu saja ini merupakan hal positif yang harus tetap bertahan, dan dalam mempertahankannya membutuhkan tindakan sosial dari masyarakat Aceh sendiri seperti menjadikan memori kolektif konflik sebagai refleksi masa lalu untuk pembelajaran dimasa kini.

Seperti yang diketahui, penyebab konflik GAM sangat beragam, mulai dari ketidakadilan pada pengelolaan sumber daya alam, faktor kekecewaan atas kebijakan pemerintah pusat dan yang lebih memprihatinkan berdampak pada kelompok etnis Jawa. Namun kini masyarakat tidak mempermasalahkan hal tersebut, mengingat Aceh dan Jawa telah hidup sebingkai dalam tatanan NKRI. Seperti yang diungkapkan MN yang kini berdomisili di Aceh, menurut MN Masyarakat Aceh kini sudah sangat menerima bahwasanya konflik bukanlah solusi untuk memecahkan masalah, masyarakat sudah mampu memaknai konflik sebagai reflektor pada setiap tindakan dan yang terpenting adalah menjaga rajutan perdamaian yang telah racik dengan tinta dan darah.

KESIMPULAN

Pasca konflik GAM pada masyarakat Aceh mengalami perkembangan dalam memaknai konflik, konflik tidak hanya dipandang negatif namun juga berdampak positif terhadap keadaan Aceh sekarang. Ingatan kolektif masyarakat Aceh sangat dibutuhkan dalam menjaga perdamaian yang sudah disepakati pada tahun 2005 silam, karena dengan merawat memori kolektif konflik GAM secara kontekstual dapat mempertahankan keadaan aman dan damai dengan menjadikan ingatan tersebut sebagai refleksi masa lalu untuk tindakan masa kini. Begitu juga terhadap relasi dengan etnis Jawa, masyarakat sudah sangat menerima keberadaan etnis Jawa, yang merupakan saudara sebangsa yang memiliki hak sosial yang setara dengan masyarakat Aceh lainnya.

REFERENSI

- Azwad, Ridwan, dkk., (2008) Aceh Bumi Iskandar Muda, Banda Aceh: Pemprov. Nanggroe Aceh Darusalam
- Badruzzaman, dkk., (2018) Ensiklopedia Budaya Adat Aceh, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Halbwachs, La memoire Collective, Alban Michael, Paris, 1997, diterjemahkan oleh Lewis A. Coser, (1992) dalam bahsa inggris On Collective Memory: The university of Chicago Press, London..
- Ishak, Otto Syamsudin, (2001) Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi Politik, Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Muchsin, Misri A., (2007) Potret Aceh dalam Bingkai Sejarah, Banda Aceh: AR-RANIRY PRESS.
- Nazaruddin, M., Dimensi Pembentuk Kesadaran Identitas KeAcehan dan Citra Diri Aceh, dalam Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 27, Nomor. 1, Januari 2014.
- Sawitri, Isna, Amran Zamzami, dkk., (1998) Panitia Peduli Aceh), Simak dan Selamatkan Aceh, Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

LAMPIRAN

PERNYATAAN ACHEH-SUMATRA MERDEKA

Acheh, Sumatra, Desember 4, 1976

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KEPADА BANGSA-BANGSA DI DUNIA,

Kami bangsa Aceh Sumatra, telah melaksanakan hak hak kami untuk menentukan nasib sendiri, dan melaksanakan tugas kami untuk melindungi hak suci kami atas tanah pusaka peninggalan nenek moyang, dengan ini menyatakan diri kami dan negeri kami bebas dan merdeka dari penguasaan dan penjajahan regime asing Jawa di Jakarta.

Tanah air kami Aceh, Sumatera, telah menjadi satu negara yang bebas, merdeka dan berdaulat selama dunia terkembang, Belanda adalah penjajah asing yang pertama datang mencoba menjajah kami ketika ia menyatakan perang kepada negara Aceh yang merdeka dan berdaulat, pada 26 Mart 1873, dan melakukan serangan atas kami pada hari itu juga, dengan dibantu oleh serdadu-serdadu sewaan Jawa, apa kesudahannya serangan Belanda ini sudah tertulis pada halaman muka surat-surat kabar di seluruh dunia, surat kabar London “Times” menulis pada 22 April, 1873:

“Suatu kejadian yang sangat menarik hati sudah diberitakan terjadi di kepulauan Hindia Timur, satu kekuatan besar dari tentara bangsa Eropah sudah dikalahkan dan dipukul mundur oleh tentara anak negeri... tentara negara Aceh, bangsa Aceh sudah mendapat kemenangan yang menentukan. Musuh mereka bukan saja sudah kalah, tetapi dipaksa melarikan diri”.

Surat kabar Amerika, “The New York Times” pada 6 Mei 1873, menulis: “Peperangan yang berkubang darah sudah terjadi di Aceh, kerajaan yang memerintah Sumatra Utara, tentara Belanda sudah menyerang negara itu dan kini kita sudah mengetahui kesudahannya, serangan Belanda telah dibalas dengan penyembelihan besar-besaran atas Belanda, jenderal Belanda sudah dibunuh, dan tentaranya melarikan diri dengan kacau balau. Menurut kelihatannya, sungguh-sungguh tentara Belanda sudah dihancur leburkan.”

Kejadian ini telah menarik perhatian seluruh dunia kepada kerajaan Aceh yang merdeka dan berdaulat lagi kuat itu. Presiden Amerika Serikat, Ulysses S. Grant sengaja mengeluarkan satu pernyataan yang luar biasa menyatakan negaranya mengambil sikap neutral yang adil, yang tidak memihak kepada Belanda atau Aceh, dan ia meminta agar negara-negara lain bersikap sama sebab ia takut perang ini bisa meluas.

Para hari 25 Desember (hari natal), 1873, Belanda menyerang Aceh lagi, untuk kali yang kedua, dengan tentara yang lebih banyak lagi, yang terdiri dari Belanda dan Jawa, dan dengan ini mulailah apa yang dinamakan oleh majalah Amerika "Harper's magazine" sebagai "perang seratus tahun abad ini". Satu perang penjajahan yang paling berlumur darah, dan paling lama dalam sejarah manusia, dimana setengah dari bangsa kami sudah memberikan korban jiwa untuk mempertahankan kemerdekaan kami. Perang kemerdekaan ini sudah diteruskan sampai pecah perang dunia ke-II, delapan orang nenek dari yang menandatangi pernyataan ini sudah gugur sebagai syuhada dalam mempertahankan kemerdekaan kami ini. Semuanya sebagai Wali Negara dan Panglima Tertinggi yang silih berganti dari negara islam Aceh Sumatra.

Tetapi sesudah Perang Dunia ke-II, ketika Hindia Belanda katanya sudah dihapuskan, tanah air kami Aceh Sumatra, tidaklah dikembalikan kepada kami, sebenarnya Hindia Belanda belum pernah dihapuskan. Sebab sesuatu kerajaan tidaklah dihapuskan kalau kesatuan wilayahnya masih tetap dipelihara -sebagai halnya dengan Hindia Belanda, hanya namanya saja yang ditukar dari "Hindia Belanda" menjadi "Indonesia" Jawa, sekarang bangsa Belanda telah digantikan oleh bangsa Jawa sebagai penjajah, bangsa Jawa itu adalah satu bangsa asing dan bangsa seberang lautan kepada kami bangsa Aceh-Sumatera. Kami tidak mempunyai hubungan sejarah, politik, budaya, ekonomi dan geografi (bumi) dengan mereka itu. Kalau hasil dari penaklukan dan penjajahan Belanda tetap dipelihara bulat, kemudian dihadiahkan kepada bangsa Jawa, sebagaimana yang terjadi, maka tidak boleh tidak akan berdiri satu kerajaan penjajahan Jawa diatas tempat penjajahan Belanda. tetapi penjajahan itu, baik dilakukan oleh orang Belanda, Eropah yang berkulit putihm atau oleh orang Jawa, Asia yang berkulit sawo matang, tidaklah dapat diterima oleh bangsa Aceh, Sumatera.

"Penyerahan kedaulatan" yang tidak sah, illegal, yang telah dilakukan oleh penjajah lama, Belanda, kepada penjajah baru, Jawa, adalah satu penipuan dan kejahatan politik yang paling menyolok mata yang pernah dilakukan dalam abad ini: sipenjajah Belanda kabarnya konon sudah menyerahkan kedaulatan atas tanah air kita Aceh, Sumatera, kepada satu "bangsa baru" yang bernama "Indonesia". Tetapi "Indonesia" adalah kebohongan, penipuan, dan propaganda, topeng untuk menutup kolonialisme bangsa Jawa. Sejak mulai dunia terkembang, tidak pernah ada orang, apalagi bangsa, yang bernama demikian, di bagian dunia kita ini. Tidak ada bangsa yang bernama demikian di kepulauan Melayu ini menurut istilah ilmu bangsa (ethnology), ilmu bahasa (philology), ilmu asal budaya (cultural anthropology), ilmu masyarakat (sociology) atau paham ilmiah yang lain, "Indonesia" hanya merek baru, dalam bahasa yang paling asing, yang tidak ada hubungan apa-apa dengan bahasa kita, sejarah kita, kebudayaan kita, atau kepentingan kita, "Indonesia" hanya merek baru, nama pura-pura baru, yang dianggap boleh oleh Belanda untuk menggantikan nama "Hindia Belanda" dalam usaha mempersatukan administrasi tanah-tanah rampasannya di dunia Melayu yang amat luas ini, sipenjajah Jawapun tahu dapat menggunakan nama ini untuk membenarkan mereka menjajah negeri orang di seberang lautan. Jika penjajahan Belanda adalah salah, maka penjajahan Jawa yang mutlak didasarkan atas penjajahan Jawa itu tidaklah menjadi benar. Dasar yang paling pokok dari hukum internasional mengatakan: "Ex Injuria Jus Non Oritur"- Hak tidak dapat berasal dari yang bukan hak, kebenaran tidak dapat berasal dari kesalahan, perbuatan legal tidak dapat berasal dari illegal.

Meskipun demikian, bangsa Jawa tetap mencoba menyambung penjajahan Belanda atas kita walaupun Belanda sendiri dan penjajah penjajah barat lainnya sudah mundur, sebab seluruh dunia mengecam penjajahan. Dalam masa tiga-puluh tahun belakangan ini kami bangsa Aceh, Sumatera, sudah mempersaksikan betapa negeri dan tanah air kami telah diperas habis-habisan oleh sipenjajah Jawa; mereka sudah mencuri harta kekayaan kami; mereka sudah merusakkan pencaharian kami; mereka sudah mengacau pendidikan anak kami; mereka sudah mengasingkan pemimpin-pemimpin kami; mereka sudah mengikat bangsa kami dengan rantai kezaliman, kekejaman, kemiskinan, dan tidak peduli: masa hidup bangsa kami pukul rata 34 tahun dan makin sehari makin kurang. Bandingkan ini dengan ukuran dunia yang 70 tahun dan makin sehari makin bertambah, sedangkan Aceh, Sumatera, mengeluarkan hasil setiap tahun bagi sipenjajah Indonesia-Jawa lebih 15 milyar dollar Amerika yang semuanya dipergunakan untuk kemakmuran pulau Jawa dan bangsa Jawa.

demikian hidup ini ada artinya, kami mau membuat hukum dan undangundang kami sendiri; yang sebagai mana kami pandang baik; menjadi penjamin kebebasan dan kemerdekaan kami sendiri; yang mana kami lebih dari sanggup; menjadi sederajat dengan semua bangsa-bangsa di dunia; sebagaimana nenek moyang kami selalu demikian, dengan pendek: Menjadi berdaulat atas persada tanah air kampung kami sendiri. Perjuangan kemerdekaan kami penuh keadilan, kami tidak menghendaki tanah bangsa lain- bukan sebagai bangsa Jawa datang merampas tanah kami, tanah kami telah dikaruniai Allah dengan kekayaan dan kemakmuran, kami berniat memberi bantuan untuk kesejahteraan manusia sedunia, kami mengharapkan pengakuan dari anggota masyarakat bangsabangsa yang baik, kami mengulurkan persahabatan kepada semua bangsa dan negara dari ke-empat penjuru bumi.

ATAS NAMA BANGSA ACHEH, SUMATERA, YANG BERDAULAT.

Tengku Hasan Muhammad Di Tiro

Ketua, Angkatan Aceh, Sumatera Merdeka

dan Wali Negara.

Acheh, Sumatera, 4 Desember 1976